

**PAPUANS
BEHIND BARS**



SOLIDARITAS RAKYAT PAPUA PRO GENDONG
SE-SORONG RAYA
BEBASKAN 4 TAPOL NFRPB

Papuans Behind Bars

LAPORAN

TRIWULAN

Juli-September 2025

Diterbitkan pertama kali pada 2025
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Aktivis melakukan aksi di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, 20 Agustus 2025.
Mereka memprotes atas rencana pemindahan empat tahanan politik ke luar West Papua.
Sumber: Facebook Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Sorong Raya

Papuans Behind Bars

Laporan Triwulan

Juli–September 2025

Ringkasan

Pada kuartal ketiga tahun 2025, kami mendapati setidaknya 54 kasus penangkapan sewenang-wenang. Tiga puluh sembilan orang yang ditangkap telah dibebaskan, sementara 14 orang lainnya masih ditahan, dan satu orang meninggal dunia. Dari 14 orang yang ditahan, satu orang telah dilimpahkan ke kejaksaan. Dari semua kasus tersebut, setidaknya 37 orang ditahan secara sewenang-wenang, 30 orang disiksa atau mengalami perlakuan buruk lainnya, dan enam di antaranya adalah anak di bawah umur.

Pada periode yang sama, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada setidaknya tujuh tahanan yang ditangkap pada periode-periode sebelumnya. Hampir semua dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata, sementara dua orang lainnya dituduh terlibat dalam pembunuhan dan pencurian. Hukuman mereka berkisar antara 10 bulan hingga 10 tahun penjara.

Pada akhir periode tersebut, tercatat setidaknya 79 tahanan politik (tapol) West Papua sedang diadili atau dipenjara setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Perinciannya, 55 tapol masih menjalani hukuman di penjara, sedangkan 24 orang lainnya masih diadili di berbagai pengadilan, seperti di Wamena, Papua Pegunungan, Nabire, Papua Tengah, Sorong, Papua Barat Daya, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Latar Belakang

Terjadi penangkapan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, menyusul serangkaian demonstrasi besar dan kerusuhan di akhir Agustus,¹ yang dipicu oleh kematian seorang pengemudi ojek *online*, yang terbunuh karena ditabrak kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus malam. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai protes atas dampak kebijakan pemangkasan anggaran, resesi ekonomi yang semakin dalamnya, serta kenaikan tunjangan

¹ Demonstrasi mahasiswa menuntut pembubaran DPR RI pada 25 Agustus dan demonstrasi buruh menuntut upah yang layak tiga hari kemudian. Demonstrasi meningkat dan menyebar ke berbagai kota.

bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).² Di West Papua, protes terkait hal-hal itu juga dilakukan mahasiswa di kantor DPR Papua dan markas Polda Papua, tapi tidak berakhir rusuh.³ Hingga akhir September, dilaporkan bahwa 959 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Penangkapan yang didasarkan pada tuduhan terlibat kerusuhan itu pun tidak terjadi di West Papua.⁴ Namun, organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mendokumentasikan kasus-kasus penangkapan dan penahanan aktivis prodemokrasi secara sewenang-wenang oleh polisi untuk mencari kambing hitam atas kerusuhan yang terjadi. Selain penahanan massal, perlawanan dan kerusuhan pada Agustus 2025 di seluruh Indonesia menewaskan setidaknya 10 orang.⁵

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara, seperti penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan pemblokiran akses terhadap pengacara oleh polisi. Mereka juga mendokumentasikan kekerasan yang dilakukan oleh aktor nonnegara seperti pembakaran terhadap rumah anggota parlemen, menteri keuangan, dan gedung parlemen daerah di Makassar, yang menyebabkan orang-orang yang terjebak di dalamnya meninggal, dan penghancuran fasilitas umum.⁶ Di sisi lain, berbagai laporan menunjukkan bahwa polisi sempat menangkap beberapa personel militer yang berpakaian sipil saat demo berakhir rusuh, tapi mereka segera dibebaskan karena polisi tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki personel militer atas dugaan



Gambar 1. Mahasiswa berunjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 29 September 2025, setelah seorang pengemudi ojek online tewas oleh polisi pada malam sebelumnya. (Wikimedia Commons/Efraimleonard)

² The Guardian, 'Indonesia protests explained: why did they start and how has the government responded?', 2 September 2025, tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2025/sep/02/indonesia-protests-explained-start-how-has-the-government-responded>.

³ JUBI, 'Gerakan Cipayung Plus Papua protes kenaikan tunjangan anggota DPR', 1 September 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2025/gerakan-cipayung-plus-papua-protes-kenaikan-tunjangan-anggota-dpr/> dan Tribunnews, 'Giliran Papua Gelar Demo, Massa Aksi di DPR Provinsi: Kantor Ini Rumah Kami', 1 September 2025, tersedia di <https://www.tribunnews.com/regional/2025/09/01/giliran-papua-gelar-demo-massa-aksi-di-dpr-provinsi-kantor-ini-rumah-kami>.

⁴ Tempo, 'Polri Tetapkan 959 Tersangka Kerusuhan Agustus 2025, Terdapat 295 Anak', 24 September 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/polri-tetapkan-959-tersangka-kerusuhan-agustus-2025-terdapat-295-anak-207294>.

⁵ Kompas.com, 'Data Korban Kerusuhan Agustus Masih 10 Orang, Komnas HAM Terus Cek Ke Lapangan', 6 September 2025, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/06/13284121/data-korban-kerusuhan-agustus-masih-10-orang-komnas-ham-terus-cek-ke>.

⁶ Komnas HAM, 'Keterangan Pers: Perkembangan Tim LNHAM Pencari Fakta Kerusuhan Agustus & September 2025', 20 September 2025, tersedia di <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-perkembangan-tim-lnham-pencari-fakta-kerusuhan-agustus-september2025>.

kejahatan apa pun.⁷ Seorang juru bicara Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan bahwa mereka yang ditangkap adalah anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang tengah mengumpulkan informasi di lapangan—ia membantah keterlibatan mereka dalam kerusuhan atau menghasut kekerasan.⁸ Berbagai organisasi masyarakat sipil dan HAM, termasuk Kantor Komisaris Tinggi HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk membentuk tim pencari fakta independen, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang.⁹ Namun, akhirnya Presiden Prabowo menolak seruan tersebut.¹⁰

Kerusuhan dan kekerasan terjadi di West Papua pada periode ini tapi terkait dengan isu yang berbeda. Dari 20 hingga 27 Agustus, sejumlah kelompok aktivis di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, melakukan aksi menentang pemindahan empat tapol Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat mereka akan diadili.¹¹ Aksi-aksi tersebut berlangsung di kantor Gubernur, pengadilan negeri dan kantor polisi tempat keempat tapol ditahan. Pada 26 dan 27 Agustus, protes semakin intensif. Para aktivis dan anggota keluarga memblokir jalan di depan kantor polisi Kota Sorong dan



Gambar 2. Para aktivis melakukan protes terhadap pemindahan empat tapol ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Agustus 2025. (Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Sorong Raya)

⁷ Tempo, 'Ada Tentara di Balik Rusuh Unjuk Rasa', 7 September 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-di-balik-rusuh-unjuk-rasa-2067325>.

⁸ Tempo, 'Kapuspen TNI: Personel Bais Sedang Melaksanakan Tugas Intelijen', 7 September 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/politik/intelijen-tni-rusuh-unjuk-rasa-2067315>.

⁹ OHCHR (Juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani), 'Indonesia protests: Call for restraint and dialogue', 1 September 2025, tersedia di <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/indonesia-protests-call-restraint-and-dialogue>.

¹⁰ Kompas.id, 'Presiden Urung Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus, Komitmen Proses Hukum Dipertanyakan', 17 September 2025, tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/presiden-urung-bentuk-tim-pencari-fakta-kerusuhan-agustus-komitmen-proses-hukum-dipertanyakan>.

¹¹ Untuk latar belakang kasus ini, lihat Papuans Behind Bar 'Quarterly Update April-Juni 2025', tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q2-2025/>.

beberapa jalan lainnya, mereka merasa aspirasi mereka tidak didengar. Polisi menanggapinya dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah kerumunan massa, kemudian menangkap 23 orang.¹²

Kerusuhan yang lebih parah, menyebabkan kematian, terjadi di Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 16 September, yang dipicu oleh nyanyian rasial terhadap pelajar West Papua. Media melaporkan bahwa sedikitnya 30 kios dan rumah, sebuah gedung sekolah menengah atas, serta beberapa gedung pemerintah dan militer di Elelim dibakar massa. Setidaknya ada 23 orang, termasuk polisi dan personel militer terluka. Setelah kerusuhan tersebut, lebih dari 200 orang non-Papua di Yalimo pindah ke Wamena.¹³ Di tempat lain, di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, pada 27 September, massa membakar sebuah pos militer dan menjarah beberapa toko di Kota Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Massa menuntut pemindahan personel militer 'nonorganik' (satuan yang tidak berasal dari West Papua) dari daerah tersebut selama prosesi pengantaran jenazah seorang pemuda West Papua. Sebelumnya, kerusuhan dipicu penembakan yang dilakukan aparat militer terhadap pemuda itu, yang diduga mabuk dan membawa pisau.¹⁴

Pada 1 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menandatangani sebuah Keputusan Presiden¹⁵ untuk mengampuni 1.178 narapidana/tahanan,¹⁶ termasuk lima tapol West Papua.¹⁷ Pengacara HAM di West Papua yang juga jaringan Papuans Behind Bars, mengkritik pemberian amnesti itu, sebab tidak diberikan kepada semua tapol West Papua. Selain itu, amnesti diberikan hanya kepada mereka yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk mendapat pembebasan bersyarat, misalnya Viktor Makamuke, yang telah menjalani dua pertiga masa hukuman di balik jeruji besi.¹⁸

¹² Tempo, 'Kota Sorong Rusuh Akibat Masyarakat Tolak Pemindahan Tapol ke Makassar', 27 Agustus 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/kota-sorong-rusuh-akibat-masyarakat-tolak-pemindahan-tapol-ke-makassar--2063695> dan Kompas.com, '1 Warga Tertembak dalam Bentrokan Massa dengan Polisi saat Pemindahan 4 Tapol ke Makassar', 27 Agustus 2025, tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2025/08/27/170911178/1-warga-tertembak-dalam-bentrokan-massa-dengan-polisi-saat-pemindahan-4>.

¹³ BBC, 'Kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, disinyalir dipicu ucapan rasial pelajar SMA – Mengapa kasus rasisme selalu berulang?', 18 September 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c864gg4qxxvo> dan JUBI, 'Empat warga ditemukan meninggal dunia saat insiden di Yalimo', 18 September 2025, tersedia di <https://jubi.id/rilis-pers/2025/empat-warga-ditemukan-meninggal-dunia-saat-insiden-di-yalimo/>.

¹⁴ BBC, 'TNI diduga tembak warga di Asmat, Papua hingga tewas – 'Kenapa menangani orang mabuk harus pakai senjata?', 1 Oktober 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4y049dj1vo>.

¹⁵ Keputusan Presiden No. 17/2025 tentang Pemberian Amnesti.

¹⁶ Menurut Undang-Undang Dasar 1945, amnesti adalah hak istimewa politik presiden, yang membutuhkan persetujuan dari parlemen, untuk mengampuni narapidana yang telah divonis, tanpa mengharuskan narapidana tersebut meminta pengampunan dari presiden.

¹⁷ CNN Indonesia, 'Penerima Amnesti Prabowo dari Kasus Penghinaan Presiden sampai Papua', 5 Agustus 2025, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804182150-12-1258620/penerima-amnesti-prabowo-dari-kasus-penghinaan-presiden-sampai-papua>. Pemberitaan media mengatakan bahwa enam tahanan politik West Papua menerima amnesti dari Presiden Prabowo, tetapi salah satu dari mereka sebenarnya adalah tahanan politik Maluku. Semuanya didakwa dan dihukum atas tuduhan makar. Kelima tahanan politik West Papua yang menerima amnesti adalah Viktor Makamuke, Alex Bless, Yance Kambuaya, Adolof Nauw, dan Hilikia Isir. Profil mereka tersedia di www.papuansbehindbars.org.

¹⁸ JUBI, 'Pemberian amnesti kepada Tapol Papua dianggap pembohongan publik', 9 Agustus 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukum/2025/pemberian-amnesti-kepada-tapol-papua-dianggap-pembohongan-publik/>.

Pada 6 Agustus, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk mengulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, yang kalah pada pemilihan pertama, menang setelah pemilihan diulang. Hasil tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada pertengahan September, setelah kandidat yang kalah, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, menggugat hasil tersebut.¹⁹ Selama masa kampanye, terdapat laporan bahwa para pendukung Tomi melakukan ujaran kebencian berdasarkan agama dan etnis, dan bahwa kubu Fakhiri telah memobilisasi pegawai negeri dan polisi.

Pada 17 September, dalam sebuah keputusan yang terpecah (lima banding empat), MK menolak uji formil yang didaftarkan oleh beberapa organisasi HAM untuk membatalkan revisi Undang-Undang (UU) TNI karena proses legislasinya kurang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Sekelompok organisasi tersebut kini mempersiapkan uji materiil untuk UU yang sama.

Pada pertengahan September, media melaporkan bahwa Polisi Federal Australia (AFP) menangkap dua orang dan mendakwa mereka dengan tuduhan melakukan perdagangan amunisi dan senjata api dari Australia ke kelompok prokemerdekaan West Papua—Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Penyelidikan kriminal ini dimulai bersama dengan pihak berwenang Selandia Baru sebagai dampak dari penyanderaan pilot Selandia Baru Philip Mehrtens oleh TPNPB.²⁰ Penahanan kedua orang tersebut ditanggguhkan oleh Polisi Federal Australia tapi mereka tetap akan diadili mulai pertengahan Oktober.²¹

Pada akhir September, Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang menyatakan bahwa mereka telah menetapkan 481 ribu hektare lahan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang setara dengan tujuh kali luas Jakarta, untuk proyek-proyek Food Estate. Proyek itu dianggap sejalan dengan program ketahanan pangan nasional, salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Menteri Agraria dan Tata Ruang juga menyatakan bahwa 481 ribu hektare lahan tersebut adalah milik negara dan bukan milik masyarakat adat setempat.²²

Pada awal Juli, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume, mengunjungi Jayapura untuk bertemu dengan berbagai penyintas pelanggaran HAM di West Papua, dari pelanggaran HAM masa lalu, konflik bersenjata yang sedang berlangsung, dan perampasan tanah untuk proyek-proyek besar terkini. Kunjungannya bersifat tidak resmi.

¹⁹ Kompas.id, 'MK Tolak Gugatan, Kemenangan Mathius-Aryoko di Pilkada Papua Sah!', 17 September 2025, tersedia di <https://www.kompas.id/artikel/kemenangan-mathius-fakhiri-aryoko-rumaropen-di-pilkada-papua-sah>.

²⁰ ABC, 'Australian men charged with allegedly trafficking firearms after international kidnapping investigation', 13 September 2025, tersedia di <https://www.abc.net.au/news/2025-09-13/men-charged-over-alleged-trafficking-of-firearms-to-indonesia/105769796>.

²¹ Lihat Australian Federal Police, 'Two men charged with allegedly trafficking firearms following international investigation into kidnapping', 13 September 2025, tersedia di <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/two-men-charged-allegedly-trafficking-firearms-following-international>.

²² CNN Indonesia, 'Pemerintah Mau Sulap 481 Ribu Ha Hutan Papua Jadi Kawasan Food Estate', 29 September 2025, tersedia di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250929130229-92-1278838/pemerintah-mau-sulap-481-ribu-ha-hutan-papua-jadi-kawasan-food-estate#goog_rewarded.

Kasus-Kasus Baru

Ada 54 tahanan politik West Papua baru, yang semuanya laki-laki, selama bulan Juli dan September 2025, sedikit meningkat dari periode sebelumnya (April-Juni 2025 ketika ada 47 tahanan baru). Sebagian besar tahanan baru (39 orang) telah dibebaskan pada hari yang sama atau beberapa hari kemudian.

Dari 54 tahanan baru, 23 orang di antaranya terkait dengan penangkapan massal di Kota Sorong di mana massa memprotes pemindahan empat tahanan politik NFRPB ke Makassar pada 25–27 Agustus. Kepolisian Kota Sorong, termasuk unit paramiliter Brimob, membubarkan paksa aksi protes menentang pemindahan empat tahanan, dan juga menangkap para pengunjung rasa, keluarga tahanan politik, dan juga warga yang kebetulan melintas di sekitar lokasi aksi protes pada tanggal 27 Agustus. Seluruh demonstran dibebaskan oleh polisi dalam tiga tahap: lima belas orang dibebaskan pada tanggal 29 Agustus; diikuti oleh tiga orang pada tanggal 30 Agustus; dan akhirnya lima orang lagi pada tanggal 1 September.



Gambar 3. Aktivis dan kerabat empat tahanan politik yang akan dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, memblokir gerbang dan jalan di depan kantor polisi, 27 Agustus 2025, sebagai bentuk protes terhadap pemindahan empat tahanan politik NFRPB. (Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Sorong Raya/Ebis Marshall)

Pada 12 Agustus, personel Kepolisian Resor Jayapura dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Bandara Sentani membubarkan demonstrasi spontan yang dilakukan oleh sekelompok aktivis di dekat Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Para pengunjung rasa bermaksud menyampaikan protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di luar kompleks bandara. Mendagri saat itu sedang berkunjung sehubungan dengan pemungutan suara ulang Gubernur Provinsi Papua, yang oleh para pengunjung rasa dianggap penuh kecurangan. Dalam pembubaran dengan kekerasan tersebut, seorang demonstran bernama Panji Agung Mangkunegoro dipukuli dan ditangkap, tapi ia kemudian dibebaskan tanpa dakwaan.

Pada 11 Juli dini hari, aparat gabungan polisi dan militer dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap delapan warga sipil—Nander Sobolim, Velis Silak, Sepi Heluka, Alfon Payage, Veri Pahabol, Tertius Kabak, Vael Silak, dan seorang anak di bawah umur berinisial JS—di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Belakangan diketahui bahwa mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap guru dan petugas kesehatan di Angguruk, Yahukimo, Maret 2025. Setelah ditahan selama tiga hari, enam orang dari mereka dibebaskan karena kurangnya bukti. Dua orang lainnya, Nander Sobolim dan Velis Silak, masih ditahan, tapi hingga akhir Agustus, belum ada kabar terbaru.²³

Pada 20 Agustus, personel Satgas Damai Cartenz menangkap enam orang yang diduga sebagai anggota TPNPB. Mereka ditangkap di Kantor Polisi Topo, Nabire/Paniai, Provinsi Papua Tengah. Salah satu dari mereka, Siprianus Weya, diduga terlibat dalam mendokumentasikan serangan bersenjata terhadap dua anggota polisi di KM 128, Distrik Siriwo, 13 Agustus 2025. Lima orang lainnya yang juga ditangkap adalah Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Meinus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip. Pada 22 Agustus 2025, juru bicara TPNPB Seby Sambom membantah tuduhan polisi bahwa keenam orang tersebut adalah anggota TPNPB. Menurutnya, mereka adalah pengungsi internal yang menjadi korban konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) dan TPNPB. Hingga akhir September, belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang akan mereka hadapi.²⁴

Pada 29 September, Satgas Damai Cartenz secara sewenang-wenang menangkap Ere Enumbi, alias Udara, dan Hugon Gire, alias Yemier Murib, di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Yemier ditangkap dengan tuduhan



Gambar 4. Ere Enumbi (kaos merah muda) dikelilingi oleh personel Satgas Damai Cartenz yang menangkapnya pada tanggal 29 September 2025. (Indonesian National Police)

²³ Human Rights Monitor, 'Police officers arbitrarily detain eight Papuans suspected of killing a teacher in Angguruk – two remain in custody', 29 Juli 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/police-officers-arbitrarily-detain-eight-papuans-suspected-of-killing-a-teacher-in-angguruk-two-remain-in-custody/>.

²⁴ Tempo, 'Satgas Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Kasus Penembakan 2 Polisi di Nabire', 20 Agustus 2025, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/satgas-tangkap-anggota-tpnpb-opm-di-kasus-penembakan-2-polisi-di-nabire-2061408>.

memasok amunisi kepada kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Ternus Enumbi, yang juga dikenal sebagai Tesko, yang beroperasi di Kabupaten Puncak Jaya.²⁵

Pada 30 September, polisi menangkap empat mahasiswa—Danilson Darki Uropmabin, Rio Yalak, Amoros Yeimo, dan Nopelianus Dogopia—saat melakukan demonstrasi di depan gerbang utama Universitas Cenderawasih di Jayapura.²⁶ Para mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Uncen sedang memperingati 63 tahun Perjanjian Roma 1962.²⁷ Sebelum menangkap mereka, polisi membubarkan paksa demonstrasi tersebut. Menurut aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang mendampingi mereka, mereka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tidak mematuhi perintah petugas dan tidak memiliki izin untuk berunjuk rasa dari polisi, yang mana hal ini tidak diatur dalam UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum.²⁸ Meskipun menjadi tersangka, mereka tidak ditahan tapi dikenai wajib lapor.



Gambar 5. Polisi menangkap empat mahasiswa Uncen dalam sebuah demonstrasi untuk memperingati 63 tahun Perjanjian Roma, di Jayapura, 30 September 2025. (Jubi.id)

²⁵ Kompas, 'Satgas Ops Damai Cartenz Bekuk Jaringan Pemasok Amunisi KKB', 30 September 2025, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/30/21545641/satgas-ops-damai-cartenz-bekuk-jaringan-pemasok-amunisi-kkb>.

²⁶ JUBI, 'Polisi Bubarkan Demonstrasi Solidaritas Peduli Uncen', 30 September 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2025/polisi-bubarkan-demonstrasi-solidaritas-peduli-uncen/>.

²⁷ Perjanjian Roma yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 30 September 1962 merupakan kelanjutan dari Perjanjian New York tahun 1962 yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan West Papua dari PBB kepada Indonesia, dan persiapan pelaksanaan referendum atau yang disebut dengan "Penentuan Pendapat Rakyat" pada tahun 1969, termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai "satu orang satu suara".

²⁸ Undang-Undang No. 9/1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perkembangan Kasus

Pada 12 Juni, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wamena memutuskan bahwa Rife Kerebea alias Trisna Telengen, bersalah sebagai anggota kelompok bersenjata TPNPB, dan melakukan pembunuhan terhadap 13 orang penambang emas. Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, empat tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penasihat hukum terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada 29 Agustus, Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan sebelumnya.²⁹ Penasihat hukum dan terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



Gambar 6. Rife Kerebea (kanan) bersama pengacaranya dalam salah satu persidangan di PN Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. (Human Rights Monitor)

Polisi menyatakan bahwa Rife bergabung dengan TPNPB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya dan bertanggung jawab dalam memantau pergerakan personel polisi dan militer, dan telah membantu mendistribusikan logistik ke markas TPNPB dan di pos-pos pemantauan; dan sering memberikan saran kepada unit-unit TPNPB. Pada 4 Februari 2025, kasusnya didaftarkan di PN Wamena. Rife didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan menyerang tempat pendulangan emas yang dikelola warga pendatang di Kali Ei, Distrik Saralada, Yahukimo, 16 Oktober 2024. Menurut pengacaranya, sejak ditangkap dan ditahan, Rife disiksa dan ditangkap tanpa diperlihatkan surat penangkapan. Ia langsung diborgol dan kepalanya ditutupi dengan kain hitam. Dia dipukuli dan para penculiknya mengancam akan membunuhnya kecuali dia mengaku. Betis kirinya bahkan ditembak dari jarak dekat. Dia juga dipaksa untuk menandatangani salinan laporan investigasi polisi tanpa diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu.



Gambar 7. Petrus Madai setelah sidang di Pengadilan Negeri Nabire, 23 Januari 2025. (Jubi/Hengky Yeimo)

Pada 16 Juli, majelis hakim PN Nabire memutuskan bahwa Petrus Madai terbukti bersalah memiliki dan membawa senjata tajam dan menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara.³⁰ Kasus ini didaftarkan kembali oleh jaksa, setelah PN Nabire sempat menerima keberatan terdakwa Petrus Madai/penasihat hukum dan membatalkan dakwaan jaksa pada 11 Maret 2025. Aparat

²⁹ Lihat putusan Pengadilan Negeri Wamena dan catatan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di https://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil_perkara.

³⁰ Lihat catatan putusan Pengadilan Negeri Nabire di https://sipp.pn-nabire.go.id/detil_perkara.

kepolisian Nabire membubarkan secara paksa demonstrasi para aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memperingati Perjanjian New York 1962 dan menangkap 99 orang aktivis KNPB, termasuk Petrus Madai, di Nabire pada 15 Agustus 2024.³¹

Dalam pembubaran tersebut, para aktivis ditendang dan dipukuli menggunakan besi, kayu rotan, dan popor senapan. Dua orang aktivis ditembak aparat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para aktivis yang ditangkap disuruh duduk di bawah terik matahari di lapangan Polres Nabire. Menurut polisi, dari 90 orang yang ditangkap, lima orang ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Dari lima orang tersebut, Marten Dogomo dan Apedus Tebai dinyatakan bersalah atas pengrusakan dan divonis di PN Nabire pada 4 Desember 2024 dengan hukuman lima bulan penjara. Tiga orang lainnya, termasuk Petrus Madai, didakwa atas kepemilikan senjata tajam. Kami belum mendapatkan informasi terbaru mengenai proses hukum dua aktivis KNPB lainnya dalam kasus-kasus tersebut.

Pada 21 Juli 2025, majelis hakim PN Wamena memutuskan bahwa Aske Mabel terbukti bersalah memiliki dan mendistribusikan amunisi dan senjata api, dan menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa. Aske Mabel ditangkap di Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 19 Februari 2025, karena melakukan desersi dari kesatuannya. Selain desersi, Aske juga dicari karena diduga mencuri empat pucuk senjata laras panjang jenis Kalashnikov dan puluhan butir amunisi dari Polres Yalimo pada awal Juni 2024. Polisi juga menyatakan bahwa Aske terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan antara November 2024 dan Januari 2025.³²

Terkait dengan kasus Aske Mabel, pada 20 Agustus, Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan PN Wamena pada Juni 2025, dan menambah hukuman Nikson Matuan menjadi sepuluh tahun penjara.³³ Nikson, yang ditangkap pada 2 Februari 2025, divonis bersalah oleh PN Wamena atas keterlibatannya dengan kelompok bersenjata dan kepemilikan senjata api yang dicuri oleh Aske Mabel. Nikson mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, majelis hakim PN Wamena memutuskan bahwa Nikson bersalah dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Jaksa mengajukan banding karena hukuman yang dijatuhkan tujuh tahun lebih rendah dari tuntutan mereka.

Pada 20 Agustus, hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan untuk menguatkan putusan PN Nabire yang memvonis Jemmy Magai Yogi atas tuduhan penyelundupan amunisi (yang didakwakan memakai UU Darurat³⁴) dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.³⁵ Satgas Damai Cartenz menyatakan bahwa Jemmy Magai Yogi adalah pemimpin kelompok

³¹ Peringatan Perjanjian New York 1962 pada Agustus 2024 diselenggarakan oleh mahasiswa West Papua di berbagai tempat di West Papua. Lihat *Papuans Behind Bars Quarterly 'Update Juli-September 2024'*, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q3-2024/>.

³² Untuk rincian keputusan Pengadilan Negeri Wamena, lihat https://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil_perkara.

³³ Lihat putusan Pengadilan Negeri Wamena dan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di https://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil_perkara.

³⁴ Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 disahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur tindakan kriminal yang berkaitan dengan senjata api, bahan peledak, dan barang-barang berbahaya lainnya. Undang-undang ini menjatuhkan hukuman berat, hukuman mati atau hukuman penjara yang lama, untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kepemilikan, distribusi, dan penggunaan senjata api secara ilegal.

³⁵ Lihat putusan Pengadilan Negeri Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura di https://sipp.pn-nabire.go.id/detil_perkara.

bersenjata dan menangkapnya di Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, 16 Oktober 2024. Pada hari yang sama, majelis hakim PN Nabire juga memvonis Maais Herlik Imburi alias Mais Karuapi yang ditangkap di Nabire pada 19 Oktober 2024,³⁶ karena dianggap memiliki dan mendistribusikan amunisi kepada Jemmy Magai Yogi. Hakim menghukum Maais dengan 10 tahun penjara.³⁷

Pada 29 Agustus, Pengadilan Tinggi Jayapura mengurangi hukuman Ken Boga dari sembilan tahun menjadi empat tahun penjara. Boga dinyatakan bersalah atas pembunuhan oleh PN Nabire pada pertengahan Juni lalu.³⁸ Menanggapi putusan tersebut, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga akhir September, belum ada keputusan yang dikeluarkan. Ken Boga ditangkap polisi pada 3 September 2024 karena diduga terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kematian seorang satpam bernama Supriyono di pos keamanan sebuah perusahaan di Nabire pada 23 Agustus 2024. Penangkapan dan keberadaan Boga sempat ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian, sehingga menyulitkan keluarga dan teman-temannya untuk melihat kondisinya. Selama ditahan, Boga mengaku dianiaya oleh sejumlah anggota polisi dan dipaksa mengaku. Selain Boga, polisi juga menangkap dua orang lainnya, Agustinus Tagi dan Yeremias Magai—Magai meninggal dalam tahanan.³⁹ Menurut pengacara keluarga Magai, ketiga orang tersebut disiksa untuk membuat pengakuan. Padahal, ketiganya berada di distrik lain yang berjarak sekitar 100 kilometer dari lokasi pembunuhan pada saat kejadian.⁴⁰ Dalam pernyataannya kepada keluarga Magai, kepala polisi mengaku ditekan oleh saudara laki-laki korban pembunuhan, yang merupakan seorang perwira senior di Kodam Cenderawasih.

Pada 17 Juli 2025, majelis hakim PN Jayapura memutuskan Alex Youw bersalah karena memiliki dan membawa senjata tajam dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara, dua bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.⁴¹ Awalnya polisi menangkap tiga orang—Alex Youw, DD, dan Yenoarius Agapa—dalam sebuah demonstrasi menentang transmigrasi di Jayapura pada 15 November 2024.⁴² DD kemudian dibebaskan karena masih di bawah umur. Sementara itu, Yenoarius Agapa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara pada periode sebelumnya, Mei 2025.

³⁶ JUBI, 'Satgas Cartenz tangkap terduga penyuplai amunisi ke WPA Paniai', 20 Oktober 2024, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2024/satgas-cartenz-tangkap-terduga-penyuplai-amunisi-ke-wpa-paniai/>.

³⁷ 'Maais Imburi' Papuans Behind Bars, <https://tapol.uwazi.io/en/entity/xvf536bv5ts>.

³⁸ Lihat catatan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0846d66f511688cbe303731363236.html>.

³⁹ Lihat Papuans Behind Bars 'Quarterly Update April-Juni 2025', tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q2-2025/>.

⁴⁰ TAPOL, 'Pembunuhan Yeremias Magai harus diusut, pelaku harus diadili', 12 Oktober 2024, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/pembunuhan-yeremias-magai-harus-diusut-pelaku-harus-diadili>

⁴¹ Lihat keputusan Pengadilan Negeri Jayapura di https://sipp.pn-jayapura.go.id/detil_perkara.

⁴² Lihat Papuans Behind Bars 'Quarterly Update Oktober-Desember 2024', tersedia di <https://papuansbehindbars.org/q4-2024/>.

Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Selama periode ini, kami menerima laporan penangkapan dan penahanan yang melibatkan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Setidaknya 30 orang menjadi korban, enam di antaranya adalah anak di bawah umur. Satu orang meninggal dunia.

Polisi dan personel marinir dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap dan menyiksa empat aktivis KNPB Yahukimo—Rinox Ulunggi, Jack Amohoso, Deko Kobak dan Sinduk E Kobak. Penangkapan dilakukan pada 12 Juli, antara pukul 22.30 dan 23.30 WIT, di sekretariat KNPB Yahukimo. Selain menangkap keempat orang tersebut, aparat kepolisian dan militer juga menggeledah sekretariat. Mereka baru dibebaskan pada 14 Juli, setelah dipukuli dan mengalami luka-luka serius. Setelah ditangkap, keempat anggota KNPB tersebut tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke Kodim. Selama perjalanan, mereka dipukuli sehingga dua dari mereka buang air kecil di celana.

Setibanya di pos komando militer, mereka ditendang dari bak muatan mobil. Di pos komando militer, keempat aktivis tersebut direndam dalam drum berisi air sambil dipukuli dari tengah malam hingga subuh. Mereka dipaksa mengakui bahwa mereka adalah anggota TPNPB. Menjelang pagi, mereka dipindahkan ke rumah tahanan Polres Yahukimo. Di kantor polisi, keempatnya kembali disiksa oleh tentara dan polisi. Marinir dilaporkan membakar jenggot dan rambut para aktivis. Kapolres memerintahkan agar para aktivis dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, marinir kembali mengintervensi staf rumah sakit, memerintahkan staf itu untuk hanya menjahit luka dan membersihkan darah tanpa memberikan perawatan lebih lanjut.



Gambar 8. Empat aktivis KNPB dari wilayah Yahukimo memberikan pernyataan terkait penangkapan dan penyiksaan mereka. (Facebook KNPB Wilayah Yahukimo)

Menurut laporan yang kami terima, akibat penyiksaan tersebut, Deko tidak bisa makan karena dagunya robek; Jack mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan harus dijahit; dan Sinduk serta Ronald disiksa sampai tidak bisa berdiri. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka kembali diinterogasi oleh polisi sejak subuh hingga malam hari, tapi polisi tidak menemukan kasus kriminal yang dapat dituduhkan kepada mereka.⁴³

⁴³ JUBI, 'Polres Yahukimo bebaskan empat aktivis KNPB', 14 Juli 2025, tersedia di <https://jubi.id/polhukam/2025/polres-yahukimo-bebaskan-empat-aktivis-knpb/>.

Personel Koramil Dekai menangkap seorang pemuda West Papua, Son Balingga, di sebuah kios bensin kecil di dekat Koramil Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 6 Agustus 2025. Ia ditangkap karena dicurigai sebagai kaki tangan orang tak dikenal yang sebelumnya datang ke kios bensin itu sambil mengacungkan senjata. Son Balingga dan temannya, LK, datang ke kios tersebut untuk mengisi bensin. Pemilik kios, yang merupakan anggota militer, tidak berhasil menangkap orang tak dikenal tersebut. Son Balingga tetap tinggal di belakang, sementara temannya melarikan diri karena ketakutan. Hingga akhir September 2025, Son Balingga dilaporkan masih ditahan oleh Polres Yahukimo tanpa ada kejelasan mengenai proses hukum selanjutnya.⁴⁴ Polisi mengatakan kepada orang tuanya dan aktivis KNPB setempat bahwa kasus Son berawal dari laporan tentara, sehingga pihak keluarga harus mendatangi Koramil Dekai terlebih dahulu. Di Koramil, keluarga diminta untuk pergi ke Kodim, komando distrik militer, karena pimpinan militer distrik ada di sana, atau ke kantor polisi karena kasus ini ditangani oleh polisi.



Gambar 9. Son Balingga. (Facebook KNPB Wilayah Yahukimo)

Enam dari mereka yang ditangkap tercatat masih berusia di bawah 18 tahun. Lima dari enam anak tersebut ditangkap dalam sebuah demonstrasi menentang pemindahan empat tapol NFRPB di Sorong, sementara seorang anak lainnya ditangkap di Kabupaten Yahukimo pada 11 Juli, atas dugaan keterlibatan dalam penyerangan dan pembunuhan seorang guru dan petugas kesehatan di Anggruk, Yahukimo, pada akhir bulan Maret.

Aparat kepolisian di Yahukimo dilaporkan menangkap dan menyiksa seorang pemuda West Papua, Viktor Deyal, di Polsek Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 3 September. Pemuda tersebut dikatakan meracau di depan kantor polisi karena berada di bawah pengaruh alkohol. Personel polisi menangkapnya, memasukkannya ke dalam mobil patroli, dan dilaporkan membawanya berkeliling sambil menyiksanya. Setelahnya, malam itu, Viktor dilaporkan ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dekai dalam keadaan tidak bernyawa.⁴⁵



Gambar 10. Potongan video saat warga berkumpul sebelum membawa jenazah Viktor Deyal ke Mapolres Yahukimo untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, 4 September 2025. (Human Rights Monitor)

⁴⁴ Human Rights Monitor, 'Arbitrary detention of Son Balingga at military headquarters in Dekai, Yahukimo', 14 Agustus 2025, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/arbitrary-detention-of-son-balingga-at-military-headquarters-in-dekai-yahukimo/>.

⁴⁵ BBC, 'Pemuda asli Papua tewas diduga akibat dianiaya polisi – 'Nyawa kami seakan mudah sekali dibunuh'', 11 September 2025, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9v7m8p1dj0o>

Papuans Behind Bars bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil West Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta LSM yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di info@papuansbehindbars.org

Kunjungi papuansbehindbars.org untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

